

DINAMIKA PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Akbar Hidayat

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: The election of Regional Head (Pilkada) will be held simultaneously on December 9, 2015. A new era in electoral systems, to create local accountability, political equity and local responsiveness. Pelalawan elections produce the dynamics that occur therein. Starting from the dynamics of issues, mass and party. So this study analyzes how the dynamics of regional head elections and the dynamics of issues, mass and parties occur. This research uses qualitative descriptive research method. Primary data obtained through interviews with key figures; Secondary data obtained from relevant agencies such as the General Election Commission and the Election Supervisory Board of Pelalawan Regency as well as the Party's offices in Pelalawan Regency. The results showed that: First, the existence of dynamics that occurred in the stage before the elections up to the selection of selected election by the KPU Pelalawan District. Second, the existence of buying and selling black campaign issues that attack both candidate pairs, the involvement of central figures and Civil State Apparatus and the seizure of the party and the United Development Party United Development Party.

Abstrak: Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak telah usai dilaksanakan 9 Desember 2015 lalu. Era baru dalam sistem pemilihan, untuk menciptakan *local accountability*, *political equity* dan *local responsiveness*. Pilkada Pelalawan menghasilkan dinamika yang terjadi didalamnya. Mulai dari dinamika isu, massa dan partai. Maka penelitian ini menganalisa bagaimana dinamika pemilihan kepala daerah dan dinamika isu, massa dan partai terjadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap tokoh kunci; data sekunder diperoleh dari instansi terkait seperti Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pelalawan maupun kantor Partai yang ada di Kabupaten Pelalawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, adanya dinamika yang terjadi pada tahap sebelum pilkada sampai dengan penetapan pasangan terpilih oleh KPU Kabupaten Pelalawan. Kedua, adanya jual beli isu black campaign yang menyerang kedua pasangan calon, adanya keterlibatan tokoh sentral dan Aparatur Sipil Negara dan adanya perebutan partai Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan.

Kata Kunci: Pilkada, dinamika, isu, massa, partai politik

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak telah usai dilaksanakan 9 Desember 2015 lalu. Era baru dalam sistem pemilihan, yang tentu bukan hanya soal waktu pelaksanaan, tetapi juga soal, yang oleh Brian C. Smith dan Robert Dahl, adalah untuk menciptakan *local accountability*, *political equity* dan *local responsiveness*, khususnya untuk melihat sejauh mana rakyat di daerah bisa menentukan sendiri nasib, pemimpin dan pemerintahannya.

Menghadapi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan serentak tanggal 9 Desember 2015 secara langsung di Kabupaten Pelalawan, beberapa partai politik turut ambil bagian secara Aktif. Pilkada Kabupaten Pelalawan diikuti oleh dua pasang calon, yakni pasangan H. Harris - Drs. H. Zardewan, MM dan pasangan H. Zukri Misran dan Drs. H. Abdul Anas Badrun. Masing-

masing pasangan bersaing untuk mendapatkan perahu dari partai politik untuk dapat maju pada proses pemilihan kepada daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2015. Pasangan H. Harris – Drs. H. Zardewan, MM (HAZA) didukung oleh Partai Amanat Nasional, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasional Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan Sejahtera dan mendapatkan total jumlah kursi sebanyak 12 kursi, sedangkan pasangan H. Zukri Misran – Drs. H. Abdul Anas Badrun (ZA) di dukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Hati Nurani Rakyat dan mendapatkan total jumlah kursi sebanyak 10 kursi.

Pilkada Kabupaten Pelalawan merupakan pilkada yang menarik untuk menjadi perhatian penulis dikarenakan menemukan dua aktor politik yakni H.M Haris dan Drs. H. Abdul Anas Badrun yang telah lama menjadi lawan politik

satu sama lain yang berawal dari pilkada pada tahun 2011. Drs. H Abdul Anas Badrun merupakan “pemain lama” yang telah mengikuti proses demokrasi beberapa periode mulai dari menjadi wakil bupati pertama dan melibatkan diri dalam proses pilkada dari tahun 2006-2015. H.M Haris merupakan mantan Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan dalam beberapa periode dan pernah menjadi wakil bupati serta menjadi calon bupati petahana pada pilkada serentak tahun 2015.

Pilkada Kabupaten Pelalawan kali ini menarik dan dinamis. Kedua belah pihak pasangan memakai cara-cara untuk memenangkan pilkada serentak tahun 2015 di Kabupaten Pelalawan. Mulai dari jual beli isu-isu negatif yang menyerang langsung pasangan calon, perebutan massa yang saling memperebutkan tokoh masyarakat yang dianggap masih memiliki pengaruh kuat pada masyarakat, keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), mobilisasi massa dan memperebutkan dukungan partai Golkar maupun PPP.

Dinamika politik sangat terkait sekali dengan persoalan partisipasi dan demokrasi. Isu partisipasi sudah lama dibahas, namun tetap saja problematik, salah satu sebabnya karena pemaksaan yang bias. Ketika partisipasi dimaknai sebagai keikutsertaan dalam menunaikan agenda-agenda pemerintah, maka medium yang disediakan hanyalah medium-medium birokrasi dan mekanisme perencanaan, penjangkaran aspirasi dan sejenisnya. Di satu sisi peneliti menyaksikan rapuhnya medium-medium partisipasi yang hendak dikelola dalam rangka pelebagaan sistem pemerintahan yang demokratis, di sisi lain peneliti melihat kapasitas kultural masyarakat untuk berpartisipasi di arena publik tidak sempat terapresiasi.

Dinamika politik memberi pandangan bahwa seni dan budaya lokal merupakan medium untuk mengekspresikan aspirasi dan kepentingan politik yang sangat penting bagi komunitas lokal. Sensitifitas terhadap informalitas masyarakat merupakan cara dalam memahami dinamika politik. Hal yang mempengaruhi dan sering muncul dalam dinamika politik adalah *money politics* (politik uang) yang semakin ternormalisasi sebagai tatanan baku dalam dinamika politik.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Peneliti memberikan uraian atau gambaran mengenai fenomena atau gejala sosial yang diteliti dengan mendeskripsikan variabel mandiri. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2003). Menurut Nawawi (1990) metode deskriptif yaitu metode-metode penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena yang bersifat aktual pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Pemilihan Kepala Daerah

Dinamika Sebelum Pemilihan

Pada tahap ini para pasangan calon melakukan sosialisasi calon pemilih agar masyarakat lebih mengenal dan tahu siapa calon bupati dan wakil bupati pada daerah mereka. Selain sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan sebelum pemilihan, meminta ‘restu’ pun dilakukan dengan cara safari dan mengunjungi tokoh-tokoh penting Kabupaten Pelalawan seperti mengunjungi salah satu tokoh masyarakat Provinsi Riau dan Kabupaten Pelalawan H. Tenas Effendy di rumah kediamannya.

Perebutan dukungan juga tak kalah dinamisnya dilakukan para pasangan calon, mulai dari memperebutkan dukungan partai politik yang akan menjadi perahu pasangan nanti maupun memperebutkan suara tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap memiliki basis massa yang besar dan berpengaruh di daerah tersebut. Tidak ikutnya dua partai besar yakni partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam ajang ini menjadi perhatian.

Dualisme kepemimpinan pada tingkat pusat (nasional) yang belum selesai pada saat proses pendaftaran membuat peta dukungan berubah. H. Harris yang menjadi ketua DPD II Partai Golkar tidak dapat menjadikan partai yang dipimpinnya

menjadi perahu utama untuk menjadi pengusung menjadi Calon Bupati sehingga H. Harris yang merupakan petahana harus menggunakan perahu partai lain, disisi lain suara dan basis PPP menjadi perebutan oleh kedua pasangan calon kepala daerah. Faktanya PPP yang dipimpin John Hendri Hasan yang mengikuti haluan kepengurusan DPP PPP versi Djan Farid memilih untuk mendukung pasangan H. Zukri Misran – H. Abdul Anas Badrun.

Perubahan dukungan juga terjadi pada Partai Keadilan Sejahtera yang pada Pilkada tahun 2011 menjadi partai pendukung dan pengusung H. Abdul Anas Badrun yang pada Pilkada tahun 2015 ini memindahkan dukungannya kepada pasangan H. Harris – H Zardewan. Tentunya perpindahan dukungan tersebut ada yang melatarbelakangi sehingga PKS mau mendukung pasangan petahana dalam pilkada ini.

Dinamika Masa Kampanye dan Masa Tenang

Strategi kampanye politik yang dijalankan oleh tim pemenangan masing-masing calon pada dasarnya menggunakan teknik kampanye massa secara langsung, dengan beragam seni hiburan untuk menyemarakkan kegiatan kampanye, yang merupakan isi yang disampaikan pasangan Harris-Zardewan beserta tim pemenangannya saat kampanye adalah memanfaatkan posisi Harris selaku *incumbent* untuk melanjutkan program lanjutan yang telah dibuat pada masa jabatan sebelumnya dan akan disempurnakan pada masa jabatan yang akan datang. Sedangkan pasangan Zukri-Anas beserta tim pemenangannya menyampaikan jargon Pelalawan Hebat dengan 5 program unggulan.

Teknik kampanye massa secara langsung dipilih karena dapat menjangkau masyarakat dalam jumlah besar dan dalam waktu yang singkat di bandingkan kampanye dari rumah ke rumah, namun biaya yang dikeluarkan biasanya lebih besar dibandingkan dengan teknik kampanye lainnya. Selain kampanye yang menyerukan program lanjutan sebagai strategi untuk memenangkan pilkada Pelalawan, tim pemenangan Harris-Zardewan juga menggunakan popularitas Harris dalam menarik suara dari masyarakat. Popularitas seorang calon bupati dan wakil bu-

pati merupakan nilai tambahan yang dimiliki calon tersebut yang dapat mendongkrak perolehan suaranya.

Dinamika Pemungutan Suara

Masuklah pada tahap yang paling menentukan dari serangkaian proses dan tahapan yang telah dilalui para pasangan calon beserta tim pemenangan. Proses dimana masyarakat yang telah diberikan janji politik dan janji program-program oleh para pasangan calon menentukan pilihan mereka. Proses pemungutan suara pada Pilkada Kabupaten Pelalawan tahun 2015 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2015 pemungutan suara dilaksanakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah disiapkan oleh KPU Pelalawan.

Pilkada Pelalawan diikuti sebanyak 193.747 pemilih yang tersebar pada dua belas kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan dan memiliki 654 TPS yang juga tersebar diberbagai desa/kelurahan yang ada. Proses pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib dan proses ini dilandasi dengan azas pemilihan Luber dan Jurdil dan tidak ada gangguan yang signifikan selama jalannya proses pemungutan suara.

Pilkada Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 tidaklah berjalan lancar dan tanpa ada celah kecurangan yang berpotensi dan telah terjadi demi memuluskan kepentingan pihak-pihak yang ingin menang. Kecurangan yang terjadi tidak terlepas dari keinginan para pihak yang saling ingin memenangkan kompetisi tersebut.

Dinamika Pasca Pemilihan

Setelah proses pemilihan pasangan calon dan perhitungan suara pada tingkat kabupaten selesai sampai pada penetapan pasangan terpilih berjalan dengan lancar. Meskipun proses tersebut telah berjalan lancar dan terkendali, ada beberapa peristiwa yang terjadi setelah proses tersebut selesai. Seperti pasangan ZA yang melakukan gugatan hasil pilkada tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi pasca ditetapkannya pasangan pemenang

pilkada setelah adanya gugatan PHPU oleh pihak ZA yang berpendapat terdapat beberapa kecurangan pada saat pemilihan terjadi. Pasangan ZA tidak memperlakukan proses yang telah dijalankan dan dilalui selama pilkada berlangsung, tetapi mereka lebih memperlakukan kecurangan yang terjadi pada pilkada ini yang mereka anggap kecurangan tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh pasangan HAZA.

Hasil pilkada Pelalawan menunjukkan pasangan ZA memiliki selisih 1.13% suara dengan pasangan terpilih yang mereka anggap memenuhi syarat untuk melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana formulasi aturan gugatan PHPU pada tingkat Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Daerah pasal 158 tentang waktu dan syarat ketentuan gugatan.

Ambang persentase yang telah ditetapkan sebagai formulasi untuk melakukan gugatan PHPU ke Mahkamah konstitusi menjadi aturan baru dan persentase yang krusial bagi para calon. Apabila persentase tidak memenuhi syarat maka MK tidak akan melakukan sidang lanjutan pada pemeriksaan pokok perkara.

Mahkamah Konstitusi akhirnya menolak gugatan pasangan ZA pada putusan dismissal yang dibacakan 26 Januari 2016 yang menyatakan bahwa pemohon yakni pasangan ZA tidak mempunyai legal standing ataupun kedudukan hukum untuk melakukan gugatan yang tidak memenuhi syarat persentase selisih suara sebanyak 1.5%.

Dinamika Isu, Massa, dan Partai Black Campaign

Isu tentang ijazah palsu yang digunakan oleh H. Harris sebagai syarat mencalonkan diri sebagai calon Bupati Pelalawan sudah lama dihembuskan oleh H. Anas Badrun sejak Pilkada Tahun 2011 yang lalu. Ijazah yang dimiliki oleh H. Harris terindikasi palsu dan digunakan untuk mendaftarkan diri sebagai calon Bupati Pelalawan pada Tahun 2011 yang lalu menurut pasangan ZA. H. Abdul Anas Badrun berkali-kali mencari cara untuk menjegal langkah H. Harris untuk maju untuk menjadi bupati Pelalawan dengan melakukan gugatan pada tingkat Pengadilan

TUN, Mahkamah Konstitusi maupun mengirim surat kepada KPU Pelalawan untuk melakukan penundaan pelantikan Bupati Pelalawan dikarenakan adanya indikasi penggunaan ijazah palsu. Anas Badrun tidak bergerak secara perorangan melainkan menggerakkan LSM yang bernama “SEKOCI INDORATU” yang terus melakukan manuver menggoyang keabsahan H. Harris sebagai Bupati terpilih.

Panasnya suhu politik yang mempertemukan dua aktor politik yang telah malang melintang di dunia politik Kabupaten Pelalawan sejak daerah ini terbentuk sangat terlihat dengan munculnya selebaran yang terdapat di rumah-rumah warga maupun selebaran yang ditempelkan pada batang pohon berisi himbauan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin berdasarkan kehidupan calon pemimpin tersebut di rumah tangga. Dengan melihat sisi rumah tangga yang harmonis dan damai dianggap sebagai jati diri seseorang dalam memimpin, apabila rumah tangganya baik maka kepemimpinannya baik dan begitu sebaliknya.

Selebaran ini banyak terdapat pada Kecamatan Ukui dimana kecamatan tersebut merupakan lumbung suara H. Abdul Anas Badrun pada pilkada tahun 2011 yang lalu. Memang sebelum pilkada digulirkan dan jauh sebelum pilkada tahun 2015 yang lalu, H. Abdul Anas Badrun diterpa keretakan dalam rumah tangga dan ditambah dengan H. Zukri melaksanakan pernikahan untuk kedua kalinya menjelang pemilihan. Hal ini dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memainkan isu tersebut guna mempengaruhi pilihan masyarakat.

Perebutan Basis Massa

Pengaruh tokoh masih dianggap penting bagi kedua belah pihak mengingat Kabupaten Pelalawan merupakan berawal dari Kerajaan Melayu Pelalawan dan mempunyai sultan bergelar Tengku. Pelalawan pernah memilih Bupati bergelar Tengku untuk dua periode pada awal mula Kabupaten Pelalawan terbentuk yakni T. Azmun Jaafar dan memiliki sekretaris daerah berdarah Tengku yakni T. Kasroen. Ditambah lagi suku melayu masih suku terbanyak yang terdapat pada daerah tersebut.

Tokoh yang dianggap tokoh sentral dan

berpengaruh pada Kabupaten Pelalawan adalah alm T. Tenas Effendy, Prof. DR. T. Dahril, M.Sc dan keluarga Tengku Jaafar bersaudara dianggap memiliki pengaruh yang kuat pada masyarakat khususnya masyarakat yang bersuku melayu. Komentor T. Dahril pada selebaran kampanye hitam dianggap keberpihakan beliau terhadap pasangan HAZA. Keterlibatan mantan Rektor UIR tersebut dipermasalahkan oleh tim pemenangan ZA dikarenakan yang bersangkutan merupakan ASN aktif dan sesuai dengan aturan yang berlaku bahwa ASN dilarang berpartisipasi aktif dalam pilkada.

Dalam kultur masyarakat Pelalawan, tokoh-tokoh adat dan agama masih menjadi pemimpin opini di tingkat masyarakat yang suaranya masih didengar. Oleh sebab itu, tidak heran bila banyak kandidat dan tim sukses melakukan berbagai pendekatan dan strategi untuk mempengaruhi opini orang-orang tersebut, dengan harapan tokoh tersebut akan menggunakan pengaruhnya untuk memilih sang kandidat sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Coleman dalam teori rational choicenya mengatakan aktor menjadi kunci untuk mempengaruhi pilihan masyarakat agar mengikuti kemauan para actor, artinya aktor mempunyai tujuan dan tindakan tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan tersebut.

Perebutan Partai

Pesta demokrasi sekali lima tahun yang diadakan di Kabupaten Pelalawan teras hambar tanpa kehadiran dua partai besar yang telah lama ikut andil dalam berbagai kegiatan politik. Tidak hadir dan ikutnya Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam kontestasi pilkada tahun 2015 membuat peta politik berubah. Partai Golkar sebagai penguasa parlemen dengan memiliki jumlah kursi yang besar dan Partai PPP yang menjadi partai yang tidak pernah absen dalam pilkada terpaksa harus tidak mengambil bagian kali ini. Dualisme kepengurusan organisasi partai pada tingkat nasional berimplikasi pada kepengurusan partai pada tingkat daerah.

Hal ini terjadi pada pilkada Pelalawan Tahun 2015 dimana masing-masing pasangan calon mengklaim mendapatkan dukungan dari kedua

partai besar tersebut. Hasil musda Partai Golkar Kabupaten Pelalawan kubu Aburizal Bakri resmi mengusung dan mencalonkan calon tunggal yakni H. Harris untuk menjadi calon Bupati Kabupaten Pelalawan, sedangkan Partai Golkar Kubu Agung Laksono mendukung dan mengusung calon lain yakni H. Husni Tamrin. Dan pasangan H. Zukri Misran – H. Abdul Anas Badrun mengklaim mendapatkan dukungan dari partai PPP kubu Djan Farid. Pada saat masa pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan dukungan dari kedua partai tersebut ditolak disebabkan kedua pasangan tidak melampirkan surat rekomendasi dari kedua kubu yang berkonflik sebagaimana aturan yang berlaku pasca munculnya konflik internal kedua partai besar tersebut.

H. Harris sebagai ketua DPD tingkat II Golkar Pelalawan tidak dapat menggunakan perahunya sendiri untuk menjadi partai pengu-sung dalam helat pilkada tersebut. Ketua DPD tingkat II Golkar Pelalawan versi Agung Laksono tidak memberikan dukungan kepada H. Harris dan lebih memberikan dukungan ke calon lain. Begitu juga Abdul Anas Badrun tidak dapat menggunakan perahu PPP untuk menjadi kendaraan politiknya. Abdul Anas Badrun dan PPP telah lama menjalin kerjasama politik dalam hal dukung mendukung dalam pilkada yang mana PPP pada tahun 2011 yang lalu menjadi partai pendukung dan pengusung Abdul Anas Badrun. Pasangan ZA hanya mendapatkan surat rekomendasi dari PPP versi Djan Farid dan PPP versi Romahurmuzi memilih untuk mendukung pasangan lainnya.

Sesuai dengan peraturan KPU untuk menyikapi dualisme kepengurusan partai yang berimpas pada geliat helat politik pada tingkat lokal/daerah adalah pasangan calon kepala daerah pada saat mendaftarkan diri boleh mendaftarkan partai yang berkonflik menjadi partai pendukung dengan syarat membawa surat dukungan dari kedua pihak pengurus yang bertikai. Pada saat hari terakhir pendaftaran kedua belah pihak tidak dapat menunjukkan dan membawa surat rekomendasi yang disyaratkan oleh KPU.

Namun pada realita dilapangan adalah baik partai Golkar maupun PPP solid untuk mendukung pasangan yang mereka dukung. Golkar

sampai pada kepengurusan akar rumput solid untuk mendukung dan memenangkan pasangan HAZA dan PPP pun kader dan pengurusnya solid untuk mendukung pasangan ZA. Walaupun secara legal mereka tidak dapat menjadi bagian pemenang yang diakui KPU tapi secara non-formal mereka solid untuk memberikan dukungan dan membantu untuk memenangkan pasangan calon.

SIMPULAN

Pilkada Kab Pelalawan mempertemukan dua aktor politik yang telah lama bertarung dalam memperebutkan kursi kepala daerah yakni H. Harris dan Drs. H. Abdul Anas Badrun. Bertemunya dua lawan politik tersebut menimbulkan dinamika yang terjadi seperti adanya isu black campaign, perebutan basis massa dan perebutan dua partai besar yakni partai Golkar dan Partai PPP. Ada perubahan kekuatan partai pendukung pada pilkada Kab Pelalawan tahun 2015, seperti PKS dan Hanura yang pada pilkada Kab Pelalawan tahun 2011 yang lalu memberikan dukungan pada pihak yang berbeda. Adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan pilkada seperti adanya money politik pemberian baju batik oleh tim pemenang tertentu. Dan adanya jual beli isu yang dimainkan oleh kedua calon.

Area perebutan dalam pilkada Kab Pelalawan adalah isu, massa dan partai. Adanya black campaign indikasi penggunaan ijazah palsu oleh H. Harris dalam proses pendaftaran sebagai calon bupati dan isu rumah tangga yang menyerang pasangan Zukri-Anas. Adanya keterlibatan ASN yang mendukung *incumbent* maupun pasangan ZA dan oknum ASN tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Pelalawan. Perebutan tokoh masyarakat dan tokoh adat dilakukan oleh kedua pasangan guna mempengaruhi masyarakat yang mana para tokoh tersebut dianggap berpengaruh ditengah masyarakat. Adanya perebutan dua partai besar Partai Golkar dan PPP yang tidak dapat terlibat dalam helat pilkada dikarenakan dualisme kepengurusan pada tingkat pusat dan kedua belah pihak saling claim dukungan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Wahab, Solichin. 1999. *Analisa Kebijakan Edisi Keempat. Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Aberbach, Joel D., Robert D. Putnam, Bert A. Rockman. 1981. *Bureaucrats and Politicians in Western Democracies*. Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts, and London.
- Adwiah, Nurul Radiatul. 2013. *Konflik Internal Partai Nasdem*. Program Strata Satu. Universitas Hasanuddin.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bertens K. dan Nugroho. *Realita Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Marbun, B.N. 2012. *Bagaimana Memenangkan Pemilu*. Jakarta : PT. Pustaka Sinar Harapan.
- Mardalis. 2007. *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muchlis. 2010. *Memahami Ilmu Politik Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Moleong, J. Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. 1998. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung : Tarsito.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Peter Scholder. 2003. *Strategi Politik*. Jakarta : Friedrich-Naumann-Stiftung, PT Mita Alembana Grafika.
- Rauf, Maswadi. 2001. *Konsensus Politik dan Konflik Politik*. Jakarta : Dirjen Dikti dan Depdiknas.
- Deny Rendra dan Hery Suryadi. 2012. *Dinamika Pergeseran Kekuasaan Politik di DPD Partai Demokrat Provinsi Riau*. Jurnal FISIP Universitas Riau. Volume 10, Nomor 2.
- Sanit, Arbi. 1982. *Sistem Politik Indonesia: Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*. Jakarta : Rajawali Press
- Smith, B. C. 1988. *Bureaucracy and Political Power*. Wheatsheaf Books LTD. Sussex.